



**LAPORAN KINERJA INTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN TENGGARONG
TAHUN 2025**

**KECAMATAN TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026**



(0541) 6667171



kantorcamattenggarong@yahoo.co.id



**Jalan Udang RT.XXVIII No.28 Kelurahan Timbau
Kode Pos 75511**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

LKjIP Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi capaian sasaran strategis, serta analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan realisasi pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Secara umum, rata-rata capaian kinerja sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 mencapai **83%** dengan kategori **Baik**. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan perbaikan pada tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Akhirnya, semoga LKjIP Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2025 ini dapat menjadi media akuntabilitas yang transparan, objektif, dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tenggarong, Februari 2026

Camat Tenggarong



Drs. Syukur Eko Budi Santoso

NIP.19680907 199902 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Tenggarong menetapkan **11 (sebelas) sasaran strategis** dengan indikator kinerja yang terukur. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh rata-rata capaian sebesar **83%** dengan kategori **Baik**.

Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2025:

- **8 indikator mencapai atau melampaui target ($\geq 100\%$)**
- **1 indikator cukup tercapai (86%)**
- **1 indikator tidak tercapai (0%)**
- **1 indikator melampaui target signifikan (128%)**

Beberapa capaian penting antara lain:

1. Tindak lanjut keluhan masyarakat mencapai 100%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat menjadi 91,44 poin (104% dari target).
3. Maturitas SPIP mencapai Level 3,83 (128% dari target).
4. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 110%.
5. Seluruh pengaduan SP4N Lapor dan temuan BPK telah ditindaklanjuti 100%.

Namun demikian, terdapat satu sasaran strategis yang belum terealisasi yaitu pelaksanaan dan pelaporan Forum Konsultasi Publik (FKP), serta capaian Nilai SAKIP Kabupaten yang belum mencapai target.

Dari sisi prinsip **Value for Money**, pelaksanaan program dan kegiatan secara umum menunjukkan:

- **Efektivitas:** Mayoritas target tercapai dan beberapa melampaui target.
- **Efisiensi:** Penggunaan anggaran mendukung output kinerja secara proporsional.
- **Ekonomis:** Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan dan pagu anggaran.



Sebagai tindak lanjut perbaikan Tahun 2026, fokus peningkatan diarahkan pada:

- Optimalisasi Forum Konsultasi Publik.
- Penguatan implementasi SAKIP.
- Peningkatan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi.
- Pemantapan sistem pengendalian internal dan digitalisasi pelayanan.

Dengan komitmen perbaikan berkelanjutan, Kecamatan Tenggarong berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan melayani.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR TABEL		ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	6
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	7
	E. Sumber Daya Aparatur	11
	F. Sumber Daya Keuangan	13
	G. Isu Strategis	13
	H. Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	14
	A. Perencanaan Kinerja	14
	1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	14
	2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	17
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	19
	4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	20
	B. Perjanjian Kinerja	26
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2025	32
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	42
	A. Capaian Kinerja Organisasi	43
	1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	43
	2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan yang lalu dan beberapa Tahun terakhir	48



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

3	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Starategis Organisasi	55
4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	62
5	Analisis dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	69
6	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	72
B.	Realisasi Anggaran	86

BAB IV	PENUTUP	97
	LAMPIRAN- LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tenggarong	3
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong Tahun 2024.....	4
Tabel 3	PNS berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 4	PNS berdasarkan Golongan	12
Tabel 5	PNS berdasarkan Eselon	12
Tabel 6	PNS berdasarkan Jabatan	13
Tabel 7	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	15
Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026.....	18
Tabel 9	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tenggarong.....	19
Tabel 10	Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025	20
Tabel 11	Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2024.....	26
Tabel 12	Program Dan Anggaran Perubahan Kecamatan Tenggarong 2025.....	28
Tabel 13	Alokasi Anggaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2025	32
Tabel 14	Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025.....	32
Tabel 15	Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2025	33
Tabel 16	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	33
Tabel 17	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	44
Tabel 18	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan yang lalu dan beberapa Tahun terakhir	49
Tabel 19	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah	56
Tabel 20	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	78
Tabel 21	Perbandingan Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025.....	82
Tabel 22	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	87
Tabel 23	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2025	98



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Tenggarong Tahun 2025





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi utama dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistem tersebut meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Dalam penyelenggaraan SAKIP, Kecamatan Tenggarong telah menyusun dokumen perencanaan dan kinerja, meliputi:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tenggarong Tahun 2021–2026;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Tenggarong Tahun 2025;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Renja Perubahan Kecamatan Tenggarong Tahun 2025; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tenggarong Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada instansi pemerintah serta penggunaan anggaran yang dikelola. Unsur penting dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan hasil analisis kinerja secara memadai.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menjadi sarana perbaikan kinerja secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur yang wilayahnya terbagi ke dalam tiga zona, yaitu zona hulu, zona tengah, dan zona pesisir. Kecamatan Tenggarong termasuk dalam zona tengah yang memiliki karakteristik wilayah dataran, perbukitan, dan perairan sungai dengan potensi ekonomi dominan pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa.

Kecamatan Tenggarong terletak pada koordinat 116°47'–117°04' Bujur Timur dan 0°21' Lintang Selatan. Secara administratif, Kecamatan Tenggarong berbatasan dengan Kecamatan Sebulu di sebelah utara dan barat, Kecamatan Tenggarong Seberang di sebelah timur, serta Kecamatan Loa Kulu di sebelah selatan.

Luas wilayah Kecamatan Tenggarong sebesar ±420,10 km² yang terdiri atas 2 desa dan 12 kelurahan. Sebaran luas wilayah desa dan kelurahan sebagaimana tercantum dalam tabel pada bagian ini.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Tenggarong



Dengan luas wilayah desa/ kelurahan di kecamatan tenggarong sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah Daratan (Km ²)	Luas Wilayah Laut (Km ²)	Luas Wilayah Desa/ Kelurahan (Km ²)	Keterangan
1	Jahab	161,57	0	161,57	
2	Bukit Biru	13,45	0	13,45	
3	Timbau	10,00	0	10,00	
4	Melayu	9,00	0	9,00	
5	Loa Ipuh	67,38	0	67,38	
6	Maluhu	8,00	0	8,00	
7	Panji	13,70	0	13,70	
8	Sukarame	4,00	0	4,00	
9	Baru	7,00	0	7,00	
10	Mangkurawang	20,00	0	20,00	
11	Loa Tebu	52,00	0	52,00	
12	Loa Ipuh Darat	20,00	0	20,00	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

13	Rapak Lambur	12,00	0	12,00	
14	Bendang Raya	22,00	0	22,00	
TOTAL		420,10		420,10	

Sumber Data: Bagian Administrasi Pemerintahan kecamatan tenggarong

Jumlah penduduk Kecamatan Tenggarong berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 tercatat sebanyak 117.308 jiwa.

- a. Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Tenggarong (Terlampir)
- b. Tabel 1 Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tenggarong (Terlampir)
- c. Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong 2025 (Terlampir)

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong 2025 :

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Jahab	2.514	2.401	4.915
2	Bukit Biru	2.714	2.554	5.268
3	Timbau	9.534	9.179	18.713
4	Melayu	7.983	7.724	15.707
5	Loa Ipuh	13.576	13.036	26.612
6	Maluhu	3.372	3.220	6.592
7	Panji	3.229	2.913	6.142
8	Sukarame	2.134	2.154	4.288
9	Baru	3.380	3.307	6.687
10	Mangkurawang	4.904	4.672	9.576
11	Loa Tebu	2.703	2.385	5.088
12	Loa Ipuh Darat	2.160	1.984	4.144
13	Rapak Lambur	1.090	1.053	2.143
14	Bendang Raya	783	650	1.433
JUMLAH		60.076	57.232	117.308

Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil



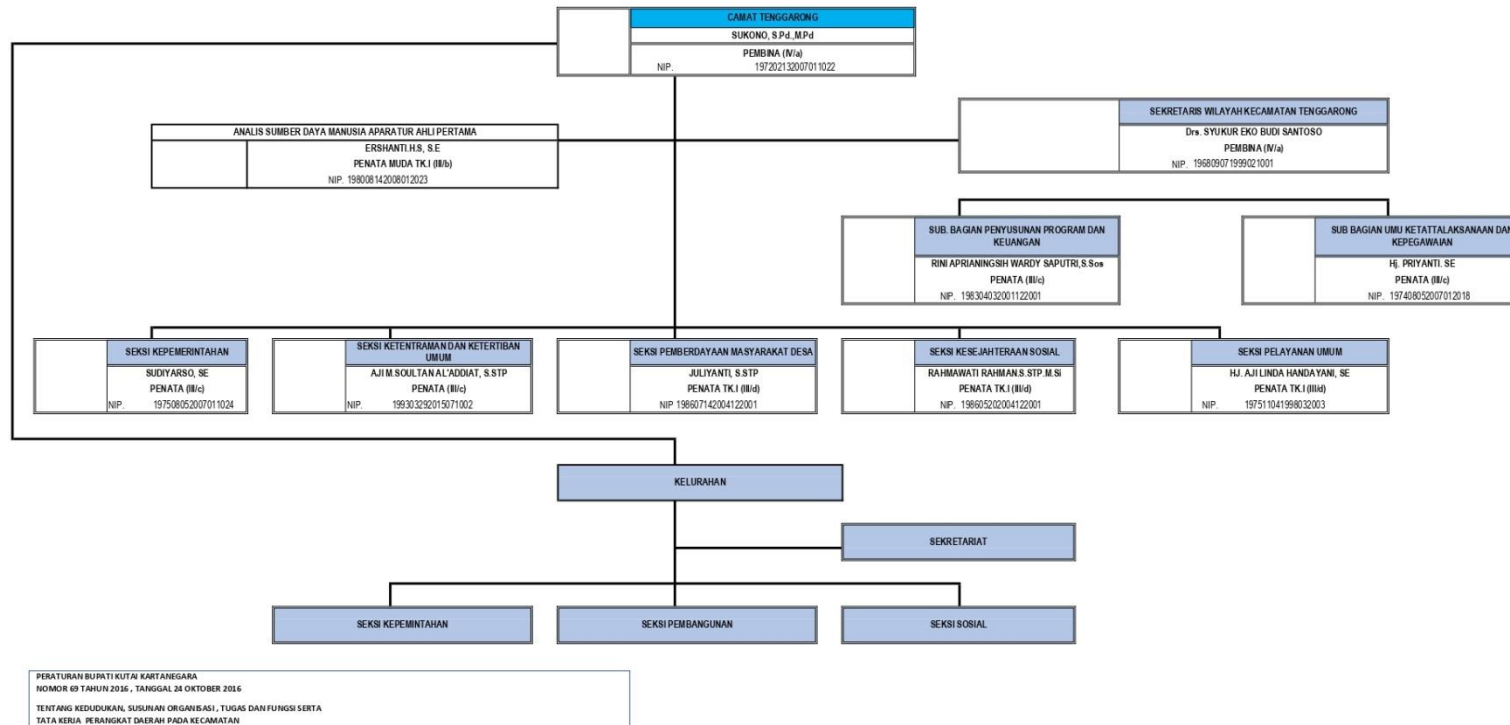
C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pembentukan Kecamatan Tenggarong didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur organisasi dan tata kerja kecamatan diatur melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Perangkat Kecamatan Tenggarong terdiri atas Sekretariat, beberapa seksi teknis, kelompok jabatan fungsional, serta kelurahan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TENGGARONG TIPE A
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024**





Pembentukan Kecamatan Tenggarong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kelurahan membawahkan :
 - a. Sekretaris;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan; dan
 - d. Seksi Sosial.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan, Kecamatan Tenggarong mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural adalah sebagai berikut.



1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan ketatalaksanaan. Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program, dan pelaporan kinerja;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan kearsipan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.



3. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perlengkapan. Uraian tugas meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan dan tata naskah dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan aset;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta pelaporan. Uraian tugas meliputi:

- Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran kecamatan;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- Menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Uraian tugas meliputi:



- a. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- b. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- d. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai ketentuan.

6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum. Uraian tugas meliputi:

- Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Fasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat;
- Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa. Uraian tugas meliputi:

- Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa;
- Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Fasilitasi pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial. Uraian tugas meliputi:

- a. Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Koordinasi penanganan masalah sosial;



- c. Pembinaan kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Uraian tugas meliputi:

- Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan tertentu;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Penanganan pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan tugas pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Kecamatan Tenggarong per 31 Desember 2025 berjumlah 85 orang Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada jabatan struktural dan pelaksana dengan tingkat pendidikan dan golongan yang beragam:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Tabel 3.PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SD	1	0	1	1,18%
2	SLTP	1	0	1	1,18%
3	SLTA	17	16	33	38,82%
5	D-I	0	0	0	0,00%
6	D-II	0	0	0	0,00%
7	D-III	1	2	3	2,35%
8	D-IV	1	1	2	2,35%
9	S1	22	22	44	51,76%
10	S2	1	1	2	2,35%
11	S3	0	0	0	0,00%
Jumlah		43	42	85	100%

Tabel 4.PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	3	0	3	3,53%
2	II	14	12	26	30,59%
3	III	13	20	33	38,82%
4	IV	3	1	4	4,706%
5	IX	8	5	13	0,152941%
6	V	2	4	6	0,070588%
Jumlah		43	42	85	100%

Tabel 5.PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0,00%
2	II.b	0	0	0	0,00%
3	III.a	1	0	1	11,11%
4	III.b	1	0	1	11,11%
5	IV.a	0	0	0	0,00%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

6	IV.b	2	5	7	77,78%
Jumlah		4	5	9	100%

Tabel 6.PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	Struktural	4	5	9	10,34%
2	Fungsional Guru	0	0	0	0,00%
3	Fungsional Non Guru	0	1	1	1,15%
4	Pelaksana	39	36	75	88,24%
Jumlah		43	42	85	100%

F. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong pada Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 160.482.353.579,00.

G. Isu Strategis

Isu strategis Kecamatan Tenggarong meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kewilayahan, pengarusutamaan gender, dan keterbukaan informasi publik. Isu-isu tersebut menjadi perhatian utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja LKjIP Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif, Kata Pengantar, Daftar Isi, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tenggarong merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Kecamatan Tenggarong telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2030. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dimaksud, dilakukan penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2025–2030. Renstra Perubahan disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta mempertimbangkan adanya penyesuaian program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tenggarong.

1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan lima misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif;



4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, Kecamatan Tenggarong berperan mendukung terutama Misi ke-1 dan Misi ke-5. Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Daerah disajikan pada Tabel 7 :

Tabel 7. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026

No	Misi	Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip
				Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan Publi
2.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indek pendidikan, Indeks pembangunan kebudayaan
				Meningkatnya Kualitas	Indek Kesehatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

				Layanan Kesehatan Masyarakat	
				Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan
				Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks gini, Indeks desa membangun
				Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuk
3	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan batu bara		
				Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
				Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
				Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	Indeks Kesulitan geografis, Presentase penurunan kawasan kumuh		
				Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan	Cakupan layanan air bersih persentase rumah layak



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

				ketersediaan air bersih	huni
				Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah
5	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penurunan		
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan
				Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut serta sesuai dengan tugas dan fungsi, Kecamatan Tenggarong mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah melalui:

- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintahan;
- Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan Kecamatan Tenggarong merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu:

“Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan, dan akuntabel.”



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

b. Sasaran

Sasaran Kecamatan Tenggarong ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	75	75	80	80	85
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	70	68	65	60	50
	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Nilai	75	76	78	79	80



c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah utama yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tenggarong, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman operasional dalam pelaksanaan strategi tersebut. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Tenggarong disajikan pada Tabel 9:

Tabel 9. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tenggarong

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKA
Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi di Kecamatan	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan
		Meningkatkan Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP
		Meningkatkan Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	Meningkatkan Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik
		Meningkatkan Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan	Meningkatkan Kualitas Kinerja Kelurahan



d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Tenggarong melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 10:

Tabel 10. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pengadaan Mebel
				Pengadaan Aset Tetap



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

				Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Peningkatan Partisipasi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

				Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Evaluasi Kelurahan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional



B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Tenggarong. IKU Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel IKU Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 – sasaran, indikator, satuan, target, formulasi, dan sumber data

No	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	Tujuan					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Inovatif Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	80	Nilai IKM diperoleh dari hasil perhitungan atas Survey yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tenggarong terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat oleh Kecamatan (Permenpan No. 14 Tahun 2017).	Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan (Permenpan No. 14 Tahun 2017)
	Sasaran					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti	Persen	60	Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti dibagi Total keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan x 100	Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan
2	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan yang memuat komitmen kinerja antara Camat Tenggarong dengan Bupati Kutai Kartanegara. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12.

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	60
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3,	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30
4,	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5,	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6,	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7,	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8,	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

9,	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan " Gerakan Etam Mengaji (GEMA) '	Laporan	48
10,	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11,	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, elisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

Table 12 Program Dan Anggaran Perubahan Kecamatan Tenggarong 2025
Terlampir

No	Program/ Kegiatan	SebelumPerubahan	SetelahPerubahan	Bertambah/ (Berkurang)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.572.127.811,00	51.607.594.956,00	3.035.467.145,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	605.000.000,00	340.087.570,00	-264.912.430,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.000.000,00	60.898.100,00	-79.101.900,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	4.015.000,00	-985.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	4.015.000,00	-985.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.000.000,00	38.630.000,00	-31.370.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	33.972.560,00	-26.027.440,00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	300.000.000,00	184.541.910,00	-115.458.090,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	14.015.000,00	-10.985.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.673.497.484,00	45.318.753.127,00	6.645.255.643,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.744.810.200,00	44.627.709.613,00	6.882.899.413,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	14.015.000,00	-10.985.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	878.687.284,00	663.013.514,00	-215.673.770,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000,00	14.015.000,00	-10.985.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	276.604.584,00	64.546.000,00	-212.058.584,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00	13.870.000,00	-11.130.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.604.584,00	50.676.000,00	-928.584,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.079.848.405,00	1.985.329.208,00	-1.094.519.197,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.999.994,00	52.999.994,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.634.458.000,00	1.078.147.795,00	-556.310.205,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	696.609.457,00	531.740.157,00	-164.869.300,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.193.954,00	39.365.482,00	-44.828.472,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.587.000,00	201.060.800,00	-252.526.200,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000,00	74.014.980,00	-75.985.020,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	543.000.000,00	154.381.000,00	-388.619.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

	Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	55.701.000,00	-124.299.000,00
	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.000.000,00	0,00	-203.000.000,00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	88.680.000,00	-61.320.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.381.442.634,00	2.752.733.347,00	-1.628.709.287,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	816.120.000,00	816.120.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.068.998,00	20.068.998,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.540.743.636,00	1.912.034.349,00	-1.628.709.287,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.734.704,00	991.764.704,00	-970.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.400.000,00	84.400.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409.334.704,00	409.334.704,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.000.000,00	37.030.000,00	-970.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.970.000.000,00	56.665.669.476,00	-304.330.524,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000.000,00	628.973.786,00	178.973.786,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	150.000.000,00	110.922.386,00	-39.077.614,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	300.000.000,00	518.051.400,00	218.051.400,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50.000.000,00	35.325.000,00	-14.675.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	35.325.000,00	-14.675.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	56.470.000.000,00	56.001.370.690,00	-468.629.310,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	220.000.000,00	181.432.900,00	-38.567.100,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 60 Usulan Pokir	56.250.000.000,00	55.819.937.790,00	-430.062.210,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.323.922.996,00	51.896.878.127,00	-427.044.869,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.900.000.000,00	8.786.000.000,00	-114.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.900.000.000,00	8.786.000.000,00	-114.000.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.297.000.000,00	12.053.376.849,00	1.243.623.151,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	487.000.000,00	261.258.669,00	-225.741.331,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8.060.000.000,00	7.890.464.390,00	-169.535.610,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.700.000.000,00	3.860.130.140,00	-839.869.860,00
	Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	41.523.650,00	-8.476.350,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30.126.922.996,00	31.057.501.278,00	930.578.282,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	29.538.000.000,00	30.621.453.000,00	1.083.453.000,00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	428.922.996,00	335.561.378,00	-93.361.618,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000,00	100.486.900,00	-59.513.100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	175.000.000,00	142.961.020,00	-32.038.980,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	175.000.000,00	142.961.020,00	-32.038.980,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	175.000.000,00	142.961.020,00	-32.038.980,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	240.000.000,00	169.250.000,00	-70.750.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	240.000.000,00	169.250.000,00	-70.750.000,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	240.000.000,00	169.250.000,00	-70.750.000,00
	Jumlah	158.281.050.807,00	160.482.353.579,00	2.201.302.772,00

D. Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Tenggarong memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp.158.281.050.807,00** dan naik menjadi **Rp.160.482.353.579,00** pada Perubahan APBD Tahun 2025. Rincian alokasi anggaran disajikan pada Tabel 13 sampai dengan Tabel 16.

[Tabel 13–16. Alokasi Anggaran per jenis belanja, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan]

Tabel 13. Alokasi Anggaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp 158.281.050.807,00	Rp 160.482.353.579,00	Rp2.201.302.772,00

1. Alokasi Anggaran Belanja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Tenggarong Tahun 2024 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp.106.398.343.409,13	Rp.109.789.176.881,00	Rp 3.390.833.472,00
Belanja Modal	Rp.51.882.707.397,97	Rp.50.693.176.698,00	(Rp 1.189.530.700,00)
Total	Rp 158.281.050.807,00	Rp 160.482.353.579,00	Rp 2.201.302.772,00

- Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2025, Kecamatan Tenggarong mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 15 berikut ini:

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	109.708.922.996,00	108.874.758.623,00	-8.350.407.540,00
Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	48.572.127.811,00	51.607.594.956,00	10.551.710.312,00
Total	158.281.050.807,00	160.482.353.579,00	2.201.302.772,00

- Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 ada 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 16 berikut ini :

Tabel 16. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.607.594.956,00	45.377.370.729,00	87,93%	6.230.224.227,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.087.570,00	171.191.580,00	50,34%	168.895.990,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.898.100,00	53.113.179,00	87,22%	7.784.921,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.015.000,00	1.966.995,00	48,99%	2.048.005,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.015.000,00	1.928.911,00	48,04%	2.086.089,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.630.000,00	37.379.969,00	96,76%	1.250.031,00
		Evaluasi Kinerja	33.972.560,00	25.937.526,00	76,35%	8.035.034,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Perangkat Daerah				
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	184.541.910,00	50.865.000,00	27,56%	133.676.910,00
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.015.000,00	0,00	0,00%	14.015.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.318.753.127,00	41.427.158.194,00	91,41%	3.891.594.933,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.627.709.613,00	40.813.367.302,00	91,45%	3.814.342.311,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.015.000,00	4.824.284,00	34,42%	9.190.716,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	663.013.514,00	608.966.608,00	91,85%	54.046.906,00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.015.000,00	0,00	0,00%	14.015.000,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	64.546.000,00	35.417.498,00	54,87%	29.128.502,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Daerah				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.870.000,00	3.030.000,00	21,85%	10.840.000,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.676.000,00	32.387.498,00	63,91%	18.288.502,00
		Administra si Umum Perangkat Daerah	1.985.329.208,00	1.025.048.495,00	51,63%	960.280.713,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	52.999.994,00	0,00	0,00%	52.999.994,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	1.078.147.795,00	760.157.444,00	70,51%	317.990.351,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	7.869.589,00	98,37%	130.411,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	531.740.157,00	122.111.550,00	22,96%	409.628.607,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.365.482,00	3.030.000,00	7,70%	36.335.482,00
		Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.060.800,00	125.819.912,00	62,58%	75.240.888,00
		Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	74.014.980,00	6.060.000,00	8,19%	67.954.980,00
		Pengadaan Barang Milik	154.381.000,00	7.060.000,00	4,57%	147.321.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.701.000,00	0,00	0,00%	55.701.000,00
		Pengadaan Mebel	10.000.000,00	1.010.000,00	10,10%	8.990.000,00
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	88.680.000,00	6.050.000,00	6,82%	82.630.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	2.752.733.347,00	2.554.483.795,00	92,80%	198.249.552,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.510.000,00	0,00	0,00%	4.510.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	816.120.000,00	653.470.810,00	80,07%	162.649.190,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	20.068.998,00	16.493.400,00	82,18%	3.575.598,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.912.034.349,00	1.884.519.585,00	98,56%	27.514.764,00
		Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	991.764.704,00	157.011.167,00	15,83%	834.753.537,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	84.400.000,00	33.467.933,00	39,65%	50.932.067,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Dinas Jabatan				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409.334.704,00	108.051.234,00	26,40%	301.283.470,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.000.000,00	6.060.000,00	7,05%	79.940.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	375.000.000,00	7.412.000,00	1,98%	367.588.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.030.000,00	2.020.000,00	5,46%	35.010.000,00
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	56.665.669.476,00	41.327.766.894,00	72,93%	15.337.902.582,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	628.973.786,00	413.078.500,00	65,67%	215.895.286,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	110.922.386,00	7.906.500,00	7,13%	103.015.886,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah n di Tingkat Kecamatan	518.051.400,00	405.172.000,00	78,21%	112.879.400,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah an yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35.325.000,00	3.030.000,00	8,58%	32.295.000,00
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.325.000,00	3.030.000,00	8,58%	32.295.000,00
		Pelaksanaan n Urusan Pemerintah an yang Dilimpahkan kepada Camat	56.001.370.690,00	40.911.658.394,00	73,05%	15.089.712.296,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Nonperizina n	181.432.900,00	17.101.800,00	9,43%	164.331.100,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang Terkait	55.819.937.790,00	40.894.556.594,00	73,26%	14.925.381.196,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.896.878.127,00	47.902.077.589,00	92,30%	3.994.800.538,00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.786.000.000,00	7.324.015.984,00	83,36%	1.461.984.016,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.786.000.000,00	7.324.015.984,00	83,36%	1.461.984.016,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.053.376.849,00	10.161.937.257,00	84,31%	1.891.439.592,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	261.258.669,00	245.874.529,00	94,11%	15.384.140,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.890.464.390,00	6.961.122.242,00	88,22%	929.342.148,00
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.860.130.140,00	2.950.639.647,00	76,44%	909.490.493,00
		Evaluasi Kelurahan	41.523.650,00	4.300.839,00	10,36%	37.222.811,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31.057.501.278,00	30.416.124.348,00	97,93%	641.376.930,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	30.621.453.000,00	30.069.287.988,00	98,20%	552.165.012,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	335.561.378,00	285.412.550,00	85,06%	50.148.828,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	100.486.900,00	61.423.810,00	61,13%	39.063.090,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	142.961.020,00	97.733.500,00	68,36%	45.227.520,00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	142.961.020,00	97.733.500,00	68,36%	45.227.520,00
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	142.961.020,00	97.733.500,00	68,36%	45.227.520,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	169.250.000,00	111.000.000,00	65,58%	58.250.000,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	169.250.000,00	111.000.000,00	65,58%	58.250.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	169.250.000,00	111.000.000,00	65,58%	58.250.000,00
		Jumlah	160.482.353.579,00	134.815.948.712,00	84,01%	25.666.404.867,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja juga merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong selama Tahun Anggaran 2025 serta sebagai instrumen evaluasi untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

Salah satu pondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui kejelasan output dan outcome yang dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai.

Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target indikator kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk indikator dengan orientasi peningkatan, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.
- Untuk indikator dengan orientasi penurunan, semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.



Interpretasi capaian kinerja menggunakan skala ordinal pengukuran sasaran sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
≥ 95	Sangat Berhasil
80 – <95	Berhasil
50 – <80	Cukup Berhasil
<50	Kurang Berhasil

Hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja ke depan

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Tenggarong merupakan akumulasi capaian kinerja seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian capaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator, target, dan realisasi kinerja tahun berjalan:

A.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Uraian dan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 disajikan sesuai dengan data Perjanjian Kinerja dan hasil pengukuran kinerja.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

(Tabel A.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	60	60	100
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30	91,44	104
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3,83	128



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA) "	Laporan	48	48	100
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,92	86
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						83

Penjelasan:

Berdasarkan 11 sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2025, diperoleh **rata-rata capaian kinerja sebesar 83%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja perangkat daerah berada pada kategori **baik**, meskipun masih terdapat indikator yang belum tercapai secara optimal.

2. Analisis Perbandingan Target dan Realisasi per Sasaran

A. Sasaran dengan Capaian 100% (Sesuai Target)



Terdapat beberapa indikator yang realisasinya sama dengan target (capaian 100%), yaitu:

1. **Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti**
Target 60%, Realisasi 60% (100%)
2. **Tindak lanjut hasil temuan BPK atas audit LKPD**
Target 100%, Realisasi 100% (100%)
3. **Jumlah inovasi perangkat daerah**
Target 1 inovasi, Realisasi 1 inovasi (100%)
4. **Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor**
Target 100%, Realisasi 100% (100%)
5. **Persentase keterinputan data Satu Data Indonesia**
Target 100%, Realisasi 100% (100%)
6. **Jumlah laporan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)**
Target 48 laporan, Realisasi 48 laporan (100%)

Indikator-indikator tersebut menunjukkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai rencana.

B. Sasaran yang Melampaui Target (>100%)

Beberapa indikator menunjukkan realisasi yang melampaui target:

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Target 88,30 poin, Realisasi 91,44 poin (104%)
Artinya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada naiknya tingkat kepuasan masyarakat.
2. **Nilai Maturitas SPIP**
Target Level 3, Realisasi 3,83 (128%)
Hal ini menunjukkan penguatan sistem pengendalian intern yang signifikan.
3. **Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten**
Target 65, Realisasi 71,51 (110%)
Menggambarkan adanya peningkatan efektivitas dan tata kelola birokrasi yang lebih baik.



Capaian di atas 100% mengindikasikan adanya kinerja yang lebih optimal dibandingkan perencanaan awal.

C. Sasaran yang Belum Mencapai Target (<100%)

Terdapat dua indikator yang belum mencapai target:

1. Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP)

Target 100%, Realisasi 0% (0%)

Tidak adanya realisasi menunjukkan kegiatan belum dilaksanakan atau belum dilaporkan, sehingga mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

2. Nilai SAKIP Kabupaten

Target 77, Realisasi 65,92 (86%)

Capaian belum memenuhi target yang ditetapkan, yang dapat disebabkan oleh faktor evaluasi sistem akuntabilitas kinerja yang masih perlu diperbaiki.

Kedua indikator ini menjadi faktor utama yang menurunkan rata-rata capaian kinerja menjadi 83%.

Secara kuantitatif, mayoritas indikator menunjukkan kinerja optimal, namun secara kualitas akuntabilitas masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, khususnya pada:

- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)
- Peningkatan nilai SAKIP

4. Kesimpulan

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik, ditandai dengan banyaknya indikator yang mencapai dan melampaui target. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek partisipasi publik (FKP) dan penguatan sistem akuntabilitas (SAKIP), yang perlu menjadi prioritas perbaikan pada tahun berikutnya agar rata-rata capaian kinerja dapat meningkat



dan lebih merata pada seluruh sasaran strategis

Berdasarkan tabel tersebut, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Kecamatan Tenggarong pada Tahun 2023, 2024 dan 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada sebagian besar indikator kinerja strategis, khususnya pada aspek pelayanan publik, kepatuhan administrasi, serta tata kelola pemerintahan.

Penjelasan: Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan telah berada pada kategori baik hingga sangat baik



A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan yang lalu dan beberapa Tahun terakhir.

Tabel 19 A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan yang lalu dan beberapa Tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	68	79,6	117	65	88.88	137	60	60	100
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	0	0



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	2	1	1	1	1	100	100	100	100
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	3	3,83	128
5	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	Persen	67	68	101	100	70,3	71	77	65,92	86
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapo	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapo	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	64	64	100	65	71,51	110



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

8	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	1	1	100	1	1	100
9	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	68	79,6	117	100	88,88	89	88,3	91,44	104
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Laporan pemetaan kemampuan mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1	100	48	48	100
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	N/A	N/A	N/A	1	1	100	100	100	100



Penjelasan :

Akuntabilitas kinerja Kecamatan disusun berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada Tahun 2023, 2024, dan 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program serta konsistensi pencapaian sasaran strategis.

1. Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik

Realisasi persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti menunjukkan:

- Tahun 2023: 79,6% (117% dari target)
- Tahun 2024: 88,88% (137% dari target)
- Tahun 2025: 60% (100% dari target)

Secara tren, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024, kemudian stabil sesuai target pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan sistem penanganan pengaduan masyarakat berjalan efektif dan terkendali.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik (FKP)

- Tahun 2024 tercapai 100%.
- Tahun 2025 belum terealisasi (0%).

Penurunan pada tahun 2025 menjadi perhatian dan memerlukan evaluasi terhadap pelaksanaan atau pelaporan kegiatan FKP.

3. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit

Tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan peningkatan kepatuhan:

- Tahun 2023 belum optimal.
- Tahun 2024–2025 mencapai 100%.

Hal ini mencerminkan perbaikan tata kelola keuangan dan kepatuhan administrasi.

4. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pada tahun 2025, nilai maturitas melampaui target (128%). Hal ini menunjukkan penguatan sistem pengendalian internal dan mitigasi risiko organisasi semakin baik.

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah



Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan:

- Tahun 2023: 68
- Tahun 2024: 70,3
- Tahun 2025: 65,92

Meskipun belum mencapai target maksimal, capaian masih dalam kategori cukup baik. Perlu penguatan pada aspek perencanaan kinerja, cascading indikator, dan evaluasi berbasis hasil.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tren IKM menunjukkan peningkatan berkelanjutan:

- 2023: 79,6
- 2024: 88,88
- 2025: 91,44

Kenaikan ini mengindikasikan kualitas pelayanan publik semakin dirasakan positif oleh masyarakat.

7. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 64 (2024) menjadi 71,51 (2025) atau 110% dari target. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas tata kelola, akuntabilitas, dan budaya kerja.

8. Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 tercapai 100%. Meskipun memenuhi target, peningkatan kualitas inovasi masih perlu dikembangkan agar berdampak lebih luas.

9. SP4N Lapor dan Satu Data Indonesia

- Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor tahun 2025 tercapai 100%.
- Keterinputan data pada Satu Data Indonesia mencapai 100%.

Hal ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi, keterbukaan informasi, dan transformasi digital.



B. Analisis Tren Kinerja 3 Tahun

Berdasarkan grafik tren:

1. **Pelayanan publik** mengalami peningkatan signifikan hingga 2024 dan stabil pada 2025.
2. **IKM meningkat konsisten**, mencerminkan kepuasan masyarakat yang semakin baik.
3. **Reformasi birokrasi menunjukkan tren naik positif.**
4. **SAKIP mengalami sedikit penurunan**, sehingga perlu strategi peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi.
5. **SPIP menunjukkan penguatan pengendalian internal.**

Secara umum, kinerja organisasi menunjukkan tren positif dengan beberapa indikator yang perlu penguatan.

1. Tingkat Capaian Umum

Mayoritas indikator kinerja tahun 2025 mencapai $\geq 100\%$ dari target. Hal ini menunjukkan perencanaan relatif realistis dan pelaksanaan program berjalan efektif.

2. Area Kinerja Sangat Baik

- Tindak lanjut temuan audit BPK (100%)
- Reformasi Birokrasi (110%)
- SPIP (128%)
- SP4N Lapor (100%)
- Satu Data Indonesia (100%)

3. Area Perlu Perhatian

- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (0%)
- Nilai SAKIP belum optimal
- Fluktuasi pada indikator pelayanan pengaduan

4. Kesimpulan Audit Kinerja

Secara umum, tingkat efektivitas pelaksanaan program berada dalam kategori **BAIK**, dengan pengendalian internal memadai dan kepatuhan administrasi



meningkat. Namun demikian, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan kinerja dan konsistensi pelaksanaan partisipasi publik.

A.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Starategis Organisasi.

Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Tenggarong Tahun 2021 – 2026 .



Tabel A.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	68	79,6	117	65	88.88	137	60	60	100
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	0	0
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	2	1	1	1	1	100	100	100	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	3	3,83	128
5	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	67	68	101	100	70,3	71	77	65,92	86
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapo	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapo	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	64	64	100	65	71,51	110
8	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	N/a	N/A	N/A	1	1	100	1	1	100
9	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	68	79,6	117	100	88,88	89	88,3	91,44	104



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Laporan pemetaan kemampuan mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1	100	48	48	100
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	-N/A	N/a	N/A	1	1	100	100	100	100



Penjelasan :

Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) menetapkan target kinerja tahun 2022–2026 sebagai arah pembangunan jangka menengah organisasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 telah mendukung pencapaian target akhir periode (2026).

Secara umum, sebagian besar indikator telah berada pada jalur yang sesuai (on track), bahkan beberapa telah melampaui target akhir Renstra.

ANALISIS PER INDIKATOR RENSTRA

1. Tujuan:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel

Indikator 1: Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan

Target Renstra:

Tahun	Target
2022	75
2023	75
2024	80
2025	80
2026	85

Realisasi:

1. 2023: 79,6
2. 2024: 88,88
3. 2025: 91,44

Analisis:

Realisasi Tahun 2025 sebesar **91,44** telah **melampaui target akhir Renstra 2026 (85)**. Artinya indikator ini telah tercapai lebih cepat dari perencanaan (ahead of schedule). Tren menunjukkan peningkatan konsisten setiap tahun.



Status: **Sangat Baik (Melampaui Target Jangka Menengah)**

2. Sasaran:

Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan

Indikator: Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Target Renstra:

Tahun	Target
2022	70%
2023	68%
2024	65%
2025	60%
2026	50%

(Target menurun menunjukkan semakin sedikit keluhan yang tidak tertangani atau perbaikan sistem pelayanan.)

Realisasi:

- 2023: 79,6%
- 2024: 88,88%
- 2025: 60%

Analisis:

Realisasi Tahun 2025 sebesar **60%** telah memenuhi target tahun berjalan (60%), namun masih di atas target akhir Renstra 2026 (50%).

Jika dimaknai sebagai peningkatan kualitas pelayanan (tingginya keluhan tertangani), maka capaian ini masih dalam jalur yang baik. Namun secara tren absolut, terdapat penurunan dibanding 2023 dan 2024.

Status: **On Track (Sesuai Tahapan Renstra)**

3. Sasaran:

Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah

Indikator: Nilai Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Target Renstra:

Tahun	Target
2022	65
2023	67
2024	70
2025	70
2026	80

Realisasi:

- 2023: 68
- 2024: 70,3
- 2025: 65,92

Analisis:

Realisasi Tahun 2025 sebesar **65,92** masih berada di bawah target Renstra Tahun 2025 (70) dan jauh dari target akhir 2026 (80).

Artinya indikator ini belum berada pada jalur pencapaian yang diharapkan dan memerlukan intervensi strategis pada:

- Penyelarasan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
- Penguatan cascading indikator
- Evaluasi dan monitoring kinerja berkala

Status: **Belum On Track**

RINGKASAN POSISI TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026

Indikator	Target 2026	Realisasi 2025	Status
Indeks Kepuasan Pelayanan	85	91,44	Melampaui
Keluhan Ditindaklanjuti	50%	60%	Sesuai Tahapan
Nilai Kinerja/SAKIP	80	65,92	Belum Tercapai



KESIMPULAN STRATEGIS

1. Indikator kepuasan pelayanan telah melampaui target akhir Renstra satu tahun lebih awal.
2. Indikator penanganan keluhan berada dalam jalur perencanaan.
3. Indikator tata kelola (SAKIP) belum menunjukkan tren menuju target akhir, sehingga menjadi prioritas perbaikan pada sisa periode 2026.
4. Secara umum, pencapaian tujuan pelayanan publik telah menunjukkan arah positif, namun aspek akuntabilitas kinerja masih memerlukan penguatan signifikan.

REKOMENDASI STRATEGIS MENUJU 2026

1. Mempertahankan kualitas pelayanan untuk menjaga IKM tetap di atas 90.
2. Meningkatkan sistem monitoring pengaduan agar tetap konsisten di atas target Renstra.
3. Melakukan reformulasi strategi peningkatan Nilai SAKIP melalui:
 - a. Penguatan manajemen risiko
 - b. Penyusunan indikator outcome yang terukur
 - c. Evaluasi kinerja triwulanan
 - d. Pendampingan penyusunan LKjIP berbasis hasil

A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

A. Analisis Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, sebagian besar indikator mencapai atau melampaui target. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) – Capaian 104%

Penyebab Keberhasilan:

- a. Peningkatan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan.



- b. Optimalisasi pelayanan terpadu di kecamatan.
- c. Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat.
- d. Pemanfaatan aplikasi survei kepuasan masyarakat secara berkala.

Alternatif Solusi/Penguatan yang Telah Dilakukan:

- a. Monitoring kualitas pelayanan secara triwulanan.
- b. Evaluasi hasil survei untuk perbaikan langsung pada unit layanan.
- c. Pembinaan aparatur dalam peningkatan etika dan budaya pelayanan.

2. Maturitas SPIP – Capaian 128%

Penyebab Keberhasilan:

- a. Penguatan manajemen risiko perangkat daerah.
- b. Dokumentasi pengendalian internal yang lebih sistematis.
- c. Komitmen pimpinan terhadap tata kelola yang akuntabel.

Alternatif Solusi/Penguatan yang Telah Dilakukan:

- a. Penyusunan peta risiko dan rencana mitigasi risiko.
- b. Evaluasi internal berkala terhadap pengendalian kegiatan.
- c. Koordinasi intensif dengan APIP.

3. Reformasi Birokrasi – Capaian 110%

Penyebab Keberhasilan:

- a. Implementasi prinsip birokrasi melayani.
- b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
- c. Dukungan digitalisasi administrasi pelayanan.

Alternatif Solusi/Penguatan yang Telah Dilakukan:

- a. Penyederhanaan proses bisnis.
- b. Digitalisasi layanan administrasi.
- c. Evaluasi kinerja berbasis hasil (outcome).

4. Tindak Lanjut BPK dan SP4N LAPOR – Capaian 100%

Penyebab Keberhasilan:



- a. Komitmen penyelesaian temuan secara tepat waktu.
- b. Koordinasi aktif dengan instansi pengawas.
- c. Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat.

Alternatif Solusi/Penguatan yang Telah Dilakukan:

- a. Pembentukan tim monitoring tindak lanjut.
- b. Pelaporan berkala progres penyelesaian temuan.
- c. Integrasi pengaduan dengan sistem pengawasan internal.

B. Analisis Penyebab Kegagalan / Belum Tercapainya Target

Terdapat beberapa indikator yang belum optimal, yaitu:

1. Forum Konsultasi Publik (FKP) – Capaian 0%

Penyebab Kegagalan:

- a. Belum terlaksananya FKP sesuai jadwal.
- b. Keterbatasan koordinasi dan partisipasi masyarakat.
- c. Dokumentasi pelaksanaan belum memenuhi standar pelaporan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- a. Penyusunan ulang jadwal FKP tahun berikutnya.
- b. Penetapan penanggung jawab kegiatan secara jelas.
- c. Penyempurnaan format laporan dan dokumentasi kegiatan.
- d. Mendorong partisipasi melalui undangan resmi dan publikasi digital.

2. Nilai SAKIP – Capaian 86%

Penyebab Belum Optimal:

- a. Cascading kinerja belum sepenuhnya selaras dengan Renstra.
- b. Indikator outcome belum sepenuhnya terukur secara kuantitatif.
- c. Monitoring dan evaluasi belum optimal sepanjang tahun berjalan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- a. Review dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja.
- b. Evaluasi internal dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja.



- c. Penguatan peran sekretariat dalam pengendalian dokumen kinerja.
- d. Penyusunan rencana aksi peningkatan nilai SAKIP Tahun 2026.

3. Penurunan Absolut Tindak Lanjut Keluhan

Walaupun capaian 100% terhadap target tahun berjalan, nilai realisasi absolut menurun dibanding 2023 dan 2024.

Penyebab:

- a. Penyesuaian target Renstra yang menurun.
- b. Perubahan metode pencatatan dan klasifikasi keluhan.
- c. Berkurangnya jumlah keluhan masuk akibat perbaikan sistem pelayanan.

Alternatif Solusi:

- a. Penguatan sistem pencatatan pengaduan.
- b. Standarisasi klasifikasi keluhan.
- c. Evaluasi berkala jumlah dan jenis pengaduan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Umum

Faktor Pendukung:

- 1. Komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas kinerja.
- 2. Koordinasi internal perangkat daerah yang cukup baik.
- 3. Dukungan regulasi dan sistem digital pelayanan.
- 4. Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap budaya kerja melayani.

Faktor Penghambat:

- 1. Keterbatasan SDM pada beberapa fungsi teknis.
- 2. Belum optimalnya perencanaan partisipatif.
- 3. Fluktuasi indikator yang dipengaruhi kebijakan eksternal (nilai kabupaten).

D. Kesimpulan Analitis

- 1. Keberhasilan kinerja Tahun 2025 didominasi oleh penguatan tata kelola, pengendalian internal, dan peningkatan kualitas pelayanan.



2. Kegagalan utama terjadi pada aspek partisipasi publik (FKP).
3. Aspek akuntabilitas kinerja (SAKIP) masih memerlukan intervensi strategis.
4. Secara umum, organisasi berada pada jalur yang positif menuju target Renstra 2026, namun memerlukan penguatan pada konsistensi manajemen kinerja.

UPAYA TINDAK LANJUT ATAS HAMBATAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja, khususnya pada aspek partisipasi publik dan akuntabilitas kinerja. Untuk mengatasi hambatan tersebut, telah dan akan dilakukan berbagai upaya tindak lanjut sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut atas Hambatan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Hambatan:

- a. Kegiatan FKP tidak terlaksana sesuai jadwal.
- b. Partisipasi masyarakat belum optimal.
- c. Dokumentasi dan pelaporan belum memenuhi standar.

Upaya Tindak Lanjut:

1. **Penjadwalan Ulang dan Integrasi dengan Agenda Kecamatan**
FKP akan diintegrasikan dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan strategis lainnya agar partisipasi lebih efektif.
2. **Penunjukan Penanggung Jawab dan Tim Teknis**
Penetapan pejabat dan tim khusus untuk memastikan pelaksanaan, dokumentasi, dan pelaporan FKP berjalan sesuai ketentuan.
3. **Peningkatan Publikasi dan Sosialisasi**
Pemanfaatan media sosial, papan pengumuman, serta undangan resmi kepada tokoh masyarakat untuk meningkatkan kehadiran peserta.



4. Standarisasi Format Pelaporan

Penyusunan template berita acara dan laporan hasil FKP untuk memastikan keseragaman dan kelengkapan dokumen.

B. Tindak Lanjut atas Hambatan Nilai SAKIP yang Belum Optimal

Hambatan:

- a. Cascading kinerja belum sepenuhnya selaras dengan Renstra.
- b. Indikator outcome belum sepenuhnya terukur.
- c. Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala.

Upaya Tindak Lanjut:

1. Review dan Penyempurnaan Perjanjian Kinerja

Penyesuaian indikator agar lebih terukur, relevan, dan selaras dengan dokumen Renstra.

2. Penguatan Cascading Kinerja

Penyelarasan sasaran strategis hingga tingkat individu melalui SKP berbasis kinerja organisasi.

3. Monitoring dan Evaluasi Triwulanan

Pelaksanaan rapat evaluasi kinerja setiap triwulan untuk memantau progres capaian.

4. Pendampingan Penyusunan Dokumen Kinerja

Peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan teknis penyusunan LKjIP dan dokumen pendukung SAKIP.

C. Tindak Lanjut atas Fluktuasi Pelayanan Publik dan Pengaduan

Hambatan:

- a. Penurunan nilai absolut tindak lanjut keluhan dibanding tahun sebelumnya.
- b. Perbedaan metode pencatatan dan klasifikasi pengaduan.



Upaya Tindak Lanjut:

1. Penguatan Sistem Pencatatan Pengaduan

Standardisasi klasifikasi dan mekanisme pencatatan keluhan masyarakat.

2. Monitoring Berkala SP4N-LAPOR

Evaluasi rutin terhadap jumlah dan jenis pengaduan untuk memastikan respons cepat dan tepat.

3. Evaluasi Standar Pelayanan

Peninjauan kembali SOP pelayanan untuk menjaga konsistensi kualitas layanan.

D. Tindak Lanjut Penguatan SDM dan Tata Kelola

Hambatan Umum:

- a. Keterbatasan SDM pada fungsi teknis tertentu.
- b. Beban administrasi yang meningkat.

Upaya Tindak Lanjut:

1. Pembagian Tugas yang Lebih Proporsional

Penataan kembali distribusi tugas sesuai kompetensi dan beban kerja.

2. Peningkatan Kompetensi Aparatur

Pelatihan internal terkait pelayanan publik, manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja.

3. Digitalisasi Administrasi

Optimalisasi penggunaan aplikasi perencanaan, pelaporan, dan pengaduan untuk mengurangi beban manual.

Kesimpulan Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut atas hambatan difokuskan pada:

1. Penguatan perencanaan partisipatif (FKP).
2. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan nilai SAKIP.
3. Standarisasi sistem pelayanan dan pengaduan.
4. Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola organisasi.



Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada Tahun 2026 seluruh indikator kinerja dapat tercapai secara optimal dan selaras dengan target Renstra

A.5 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A. Gambaran Umum

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dianalisis berdasarkan keterkaitan antara input (SDM, anggaran, sarana prasarana), proses pelaksanaan kegiatan, serta output dan outcome yang dihasilkan.

Rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2025 sebesar **83%** menunjukkan bahwa sebagian besar program telah berjalan efektif. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai target kinerja.

B. Analisis Efisiensi Berdasarkan Aspek Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi:

- Jumlah aparatur relatif terbatas dibanding beban administrasi.
- Tugas pelayanan publik cukup tinggi.
- Beberapa indikator bersifat lintas fungsi (SAKIP, SPIP, RB).

Efisiensi yang Dicapai:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (104%)
- SPIP (128%)
- Reformasi Birokrasi (110%)
- Tindak Lanjut BPK (100%)

Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah SDM terbatas, kinerja tetap optimal melalui:

- Pembagian tugas berbasis fungsi.
- Koordinasi internal yang efektif.



- c. Komitmen pimpinan dalam pengendalian kinerja.

Kesimpulan SDM:

Penggunaan SDM tergolong **efisien dan produktif**, namun perlu peningkatan kapasitas pada aspek akuntabilitas kinerja (SAKIP).

2. Penggunaan Anggaran

Walaupun tidak disertai data rinci serapan anggaran, efisiensi dapat dilihat dari perbandingan capaian output terhadap target.

Indikator dengan capaian $\geq 100\%$:

- a. Pelayanan publik
- b. IKM
- c. SPIP
- d. Reformasi Birokrasi
- e. SP4N LAPOR
- f. Satu Data Indonesia
- g. GEMA
- h. Tindak Lanjut BPK

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program tersebut mampu menghasilkan output sesuai atau melebihi target (value for money).

Indikator belum optimal:

- a. Forum Konsultasi Publik (0%)
- b. Nilai SAKIP (86%)

Jika terdapat alokasi anggaran pada FKP namun tidak terealisasi, maka terdapat potensi inefisiensi perencanaan. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk penyesuaian alokasi kegiatan tahun berikutnya.

Kesimpulan Anggaran:

Secara umum anggaran digunakan secara **cukup efisien**, dengan sebagian besar indikator menunjukkan hubungan positif antara input dan hasil.



3. Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana prasarana seperti:

- a. Ruang pelayanan terpadu
- b. Sistem pengaduan SP4N-LAPOR
- c. Aplikasi survei kepuasan masyarakat
- d. Sistem dokumentasi SPIP dan SAKIP

telah mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola.

Efektivitas sarana prasarana terlihat dari:

- a. Peningkatan nilai IKM
- b. Optimalnya tindak lanjut pengaduan
- c. Meningkatnya nilai maturitas SPIP

Kesimpulan Sarpras:

Sarana prasarana dimanfaatkan secara optimal dan mendukung peningkatan kinerja organisasi.

C. Analisis Efisiensi Berdasarkan Rasio Capaian

Dari 11 indikator kinerja:

- a. 8 indikator (73%) mencapai $\geq 100\%$
- b. 2 indikator belum mencapai target
- c. 1 indikator tidak tercapai

Mayoritas capaian di atas target menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan.

Namun, ketidaktercapaian FKP menunjukkan perlunya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan agar tidak terjadi pemborosan sumber daya.

D. Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi

Faktor Pendukung:

1. Komitmen pimpinan terhadap pengendalian kinerja.
2. Koordinasi internal yang baik.
3. Digitalisasi sistem pelayanan dan pelaporan.



4. Budaya kerja responsif terhadap pengaduan.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan SDM pada fungsi tertentu.
2. Perencanaan kegiatan partisipatif yang belum optimal.
3. Fluktuasi indikator eksternal (nilai kabupaten).

E. Kesimpulan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Secara umum penggunaan sumber daya Tahun 2025 dapat dikategorikan **Efisien dan Efektif**.
2. Mayoritas indikator menunjukkan capaian optimal bahkan melampaui target.
3. Inefisiensi terjadi pada kegiatan yang tidak terealisasi (FKP).
4. Aspek akuntabilitas kinerja (SAKIP) masih perlu penguatan agar sumber daya menghasilkan dampak yang lebih optimal.

F. Rekomendasi Peningkatan Efisiensi Tahun 2026

1. Penguatan perencanaan berbasis hasil (outcome-based planning).
2. Monitoring triwulanan terhadap realisasi kegiatan.
3. Penyesuaian alokasi anggaran berbasis evaluasi capaian kinerja.
4. Peningkatan kapasitas aparatur pada manajemen kinerja dan pengukuran indikator.

A.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis Program/Kegiatan Terhadap Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)

I. Gambaran Umum Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil normalisasi capaian PK dan koreksi Predikat AKIP, diperoleh:

- a. **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) : 83%**
- b. **Predikat PKO : BAIK**



Secara umum kinerja organisasi tergolong **baik**, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum optimal.

Total Realisasi Anggaran:

Rp 134.815.948.712 (84,01%) dari total Rp 160.482.353.579

II. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan PK

1. Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan

Capaian: 100%

Program Penunjang:

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Realisasi: 72,93%

Subkegiatan yang mendukung:

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (73,05%)
- Pelaksanaan Urusan Terkait Kewenangan Lain (73,26%)
- Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan (65,67%)

Analisis:

Walaupun serapan anggaran tidak 100%, kegiatan inti pelayanan tetap berjalan optimal. Hal ini menunjukkan:

- Efisiensi operasional pelayanan
- Fokus penggunaan anggaran pada kegiatan prioritas pelayanan langsung

2. Sasaran: Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK

Capaian: 100%

Program Penunjang:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (91,41%)
- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan (91,85%)

Analisis:

Tingginya serapan administrasi keuangan mendukung:



- Ketepatan waktu pelaporan
- Kepatuhan terhadap regulasi
- Minimnya temuan lanjutan

Program administrasi keuangan menjadi faktor kunci keberhasilan indikator ini.

3. Sasaran: Maturitas SPIP

Capaian: 128% (dinormalisasi 110%)

Program Pendukung:

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (76,35%)
- Koordinasi Laporan Capaian Kinerja (96,76%)

Analisis:

Penguatan pengendalian internal berjalan efektif meskipun beberapa sub kegiatan perencanaan serapannya rendah.

Artinya, peningkatan maturitas SPIP lebih didorong oleh:

- Komitmen pimpinan
- Penguatan sistem pengendalian internal
- Pengawasan melekat

4. Sasaran: SP4N-LAPOR, Satu Data, GEMA, Inovasi Daerah

Semua tercapai 100%

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:

- Realisasi 92,30%

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan:

- 97,93%

Analisis:

Tingginya partisipasi kelembagaan masyarakat dan stabilitas sosial mendukung keberhasilan indikator partisipatif dan sosial kemasyarakatan.

III. Program/Kegiatan Penyebab Kegagalan atau Kurang Optimal

1. Sasaran: Forum Konsultasi Publik (FKP)



Capaian: 0%

Subkegiatan:

- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah → 0%
- Serapan anggaran 0%

Analisis:

Kegagalan disebabkan oleh:

- Tidak terlaksananya forum
- Tidak adanya realisasi anggaran
- Perencanaan partisipatif tidak berjalan

Dampak:

- Menurunkan rata-rata NKO
- Mengurangi kualitas partisipasi publik

2. Sasaran: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian: 86%

Program Penunjang:

- Perencanaan & Evaluasi Kinerja (50,34%)
- Pengumpulan Data Statistik (27,56%)
- Administrasi Umum (51,63%)
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah (15,83%)

Analisis:

Beberapa kegiatan perencanaan dan administrasi memiliki serapan rendah, sehingga berdampak pada:

- Belum optimalnya dokumentasi dan pengukuran outcome
- Nilai SAKIP belum mencapai target

Masalah utama bukan pada pelaksanaan kegiatan fisik, tetapi pada kualitas sistem manajemen kinerja.

3. Program dengan Serapan Rendah (Berpotensi Menghambat)

Beberapa sub kegiatan dengan realisasi sangat rendah:



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung (1,98%)
- Pengadaan Kendaraan Dinas (0%)
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (0%)
- Penatausahaan Arsip Dinamis (8,19%)
- Koordinasi Perencanaan dengan Instansi Vertikal (7,13%)

Dampak:

- Berpotensi menurunkan kualitas tata kelola
- Menghambat peningkatan nilai SAKIP dan RB
- Mengurangi optimalisasi aset daerah

IV. Hubungan Efisiensi Anggaran dan Capaian PK

Menarik untuk dicermati:

- Total serapan anggaran: 84,01%
- Nilai Kinerja Organisasi: 83%
- Predikat PKO: BAIK

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara:

Input (anggaran) $\approx$ Output (kinerja)

Artinya:

- Tidak terjadi pemborosan signifikan
- Efisiensi relatif sejalan dengan capaian kinerja
- Namun perencanaan partisipatif perlu diperbaiki

V. Kesimpulan Analisis

Program yang Sangat Menunjang Keberhasilan:

1. Administrasi Keuangan
2. Pelayanan Publik Kecamatan
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Penguatan SPIP dan RB

Program yang Menjadi Faktor Penghambat:

1. Forum Konsultasi Publik



2. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
3. Pengelolaan Statistik dan Data
4. Pemeliharaan dan Pengadaan Aset

VI. Rekomendasi Strategis Tahun 2026

1. Wajib pelaksanaan FKP minimal 1 kali per tahun.
2. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis outcome.
3. Monitoring triwulanan atas sub kegiatan dengan serapan <50%.
4. Optimalisasi anggaran pemeliharaan agar mendukung nilai SAKIP dan RB.
5. Integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja.

Analisis Program/Kegiatan merupakan sarana bagi organisasi untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana pencapaiannya berkaitan dengan yang diterima, yaitu dengan kata lain merupakan informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam melaksanakan amanahnya.

Dalam analisis ini dijelaskan proses pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dari masing-masing pejabat struktural yang telah dibuat sesuai pendukung program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:



Tabel 21 A.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
1	Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	86%	51.607.594.956	45.377.370.729	87,93%	97,80%	Cukup Efisien
2	Meningkatnya kualitas & jangkauan pelayanan publik	Keluhan ditindaklanjuti	100%	108.874.758.623	89.438.577.983	82,15	121,73%	Sangat Efisien
	TOTAL		Rata-rata 83%	160.482.353.579	134.815.948.712	84,01%		



Perbandingan Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran dengan Persentase Realisasi/Penyerapan Anggaran Tahun 2025 berdasarkan:

- **Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (PK)** = 83%
- **Realisasi/Penyerapan Anggaran** = 84,01%
- **Total Anggaran** = Rp 160.482.353.579,00
- **Total Realisasi** = Rp 134.815.948.712,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

1. Tabel Perbandingan Utama

Uraian	Persentase (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	83,00%
Realisasi/Penyerapan Anggaran	84,01%
Selisih (Kinerja – Serapan)	-1,01%

2. Analisis Rasio Efisiensi

Rumus Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Serapan Anggaran}} \times 100$$

Perhitungan Tahun 2025

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi} &= \frac{83}{84,01} \times 100 \\ &= 98,80\%\end{aligned}$$

3. Interpretasi

Rasio Efisiensi	Kategori
> 100%	Sangat Efisien
= 100%	Efisien
90 – 99%	Cukup Efisien
< 90%	Kurang Efisien



Hasil Tahun 2025: 98,80% (Cukup Efisien)

Artinya:

- Tingkat penyerapan anggaran (84,01%) sedikit lebih tinggi dibanding capaian kinerja (83%).
- Selisih 1,01% menunjukkan bahwa output kinerja hampir sebanding dengan belanja yang dikeluarkan.
- Tidak terdapat pemborosan signifikan, namun masih terdapat ruang optimalisasi agar capaian kinerja dapat melampaui tingkat serapan anggaran.

4. Analisis Substansi Kinerja

A. Faktor Penahan Rata-Rata Kinerja

Beberapa indikator dengan capaian rendah:

- Forum Konsultasi Publik (0%)
- Nilai SAKIP (86%)

Hal ini menurunkan rata-rata kinerja menjadi 83%.

B. Faktor Pendorong Kinerja

Indikator dengan capaian >100%:

- Maturitas SPIP (128%)
- Indeks RB (110%)
- IKM (104%)

Indikator ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola.

5. Kesimpulan Akhir

1. Secara agregat, pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja Tahun 2025 berada pada kategori **cukup efisien (98,80%)**.
2. Keseimbangan antara output dan belanja relatif terjaga.
3. Diperlukan:
 - Optimalisasi capaian indikator yang belum mencapai target.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

- Penajaman perencanaan agar kinerja dapat melampaui tingkat serapan anggaran.
- Penguatan monitoring program dengan realisasi rendah.

PERBANDINGAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

(Berdasarkan DPA Riil TA 2025)

A. Rekapitulasi Tingkat Program

Perbandingan Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Sisa (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.607.594.956	45.377.370.729	87,93	6.230.224.227
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik	56.665.669.476	41.327.766.894	72,93	15.337.902.582
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	51.896.878.127	47.902.077.589	92,30	3.994.800.538
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	142.961.020	97.733.500	68,36	45.227.520
5	Program Penyelenggaraan Urusan	169.250.000	111.000.000	65,58	58.250.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Sisa (Rp)
	Pemerintahan Umum				
	TOTAL	160.482.353.579	134.815.948.712	84,01	25.666.404.867

B. Analisis Perbandingan Kinerja dan Anggaran per Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi 87,93%.

Didominasi belanja pegawai (Administrasi Keuangan 91,41%).

Beberapa sub kegiatan rendah (0%–27%) seperti:

- Forum Perangkat Daerah (0%)
- Penyusunan Prognosis Realisasi (0%)
- Pemeliharaan Gedung (1,98%)

Analisis:

Serapan cukup tinggi, namun terdapat kegiatan tidak berjalan yang mempengaruhi efisiensi internal.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Realisasi 72,93%.

Sub kegiatan rendah:

- Koordinasi/Sinergi (7,13%)
- Urusan Non Perizinan (9,43%)
- Pelayanan Wilayah Kecamatan (8,58%)

Analisis:

Program ini menjadi faktor utama rendahnya rata-rata serapan. Perlu penguatan perencanaan teknis dan penjadwalan kegiatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Realisasi 92,30% (tertinggi).

Kegiatan dominan:



- Lembaga Kemasyarakatan (98,20%)
- Partisipasi Musrenbang (94,11%)
- Sarana Prasarana Kelurahan (88,22%)

Analisis:

Program sangat optimal dan efektif, menunjukkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan yang baik.

4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi 68,36%.

Analisis:

Serapan sedang. Perlu evaluasi intensitas kegiatan harmonisasi tokoh masyarakat.

5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Realisasi 65,58%.

Analisis:

Masih terdapat ruang optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan.

C. Analisis Rasio Efisiensi per Program

Rumus:

Rumus Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100$$

Karena rata-rata capaian sasaran 83% dan serapan 84,01%, maka rasio global:

98,80% (Cukup Efisien)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Evaluasi Program:

Program	Serapan (%)	Evaluasi Efisiensi
Penunjang	87,93	Cukup Efisien
Pelayanan Publik	72,93	Perlu Optimalisasi
Pemberdayaan	92,30	Efisien
Trantibum	68,36	Perlu Peningkatan
Pemerintahan Umum	65,58	Perlu Penguatan

D. Analisis Perbandingan Kinerja dan Anggaran Secara Agregat

Uraian	Persentase
Rata-rata Capaian Kinerja	83%
Realisasi Anggaran	84,01%
Selisih	-1,01%

Interpretasi:

- Keseimbangan antara kinerja dan serapan relatif terjaga.
- Program Pemberdayaan menjadi penyumbang efektivitas tertinggi.
- Program Pelayanan Publik perlu perbaikan agar output sebanding dengan pagu yang besar.

E. Kesimpulan Strategis

1. Secara total, realisasi anggaran sebesar 84,01% menunjukkan pengelolaan cukup baik.
2. Program dengan pagu terbesar (Pelayanan Publik) belum optimal dalam serapan.
3. Program Pemberdayaan menunjukkan best practice yang dapat direplikasi.
4. Terdapat beberapa sub kegiatan dengan realisasi 0% yang perlu evaluasi perencanaan.



B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ada pada Kecamatan Tenggarong dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah **84,01%**, adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :



Tabel 23 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.607.594.956,00	45.377.370.729,00	87,93%	6.230.224.227,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.087.570,00	171.191.580,00	50,34%	168.895.990,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.898.100,00	53.113.179,00	87,22%	7.784.921,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.015.000,00	1.966.995,00	48,99%	2.048.005,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.015.000,00	1.928.911,00	48,04%	2.086.089,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.630.000,00	37.379.969,00	96,76%	1.250.031,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.972.560,00	25.937.526,00	76,35%	8.035.034,00
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	184.541.910,00	50.865.000,00	27,56%	133.676.910,00
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.015.000,00	0,00	0,00%	14.015.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.318.753.127,00	41.427.158.194,00	91,41%	3.891.594.933,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.627.709.613,00	40.813.367.302,00	91,45%	3.814.342.311,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.015.000,00	4.824.284,00	34,42%	9.190.716,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	663.013.514,00	608.966.608,00	91,85%	54.046.906,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		SKPD				
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.015.000,00	0,00	0,00%	14.015.000,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	64.546.000,00	35.417.498,00	54,87%	29.128.502,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.870.000,00	3.030.000,00	21,85%	10.840.000,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.676.000,00	32.387.498,00	63,91%	18.288.502,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.985.329.208,00	1.025.048.495,00	51,63%	960.280.713,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.999.994,00	0,00	0,00%	52.999.994,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.078.147.795,00	760.157.444,00	70,51%	317.990.351,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	7.869.589,00	98,37%	130.411,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	531.740.157,00	122.111.550,00	22,96%	409.628.607,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.365.482,00	3.030.000,00	7,70%	36.335.482,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.060.800,00	125.819.912,00	62,58%	75.240.888,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	74.014.980,00	6.060.000,00	8,19%	67.954.980,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.381.000,00	7.060.000,00	4,57%	147.321.000,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.701.000,00	0,00	0,00%	55.701.000,00
		Pengadaan Mebel	10.000.000,00	1.010.000,00	10,10%	8.990.000,00
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	88.680.000,00	6.050.000,00	6,82%	82.630.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.752.733.347,00	2.554.483.795,00	92,80%	198.249.552,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.510.000,00	0,00	0,00%	4.510.000,00



		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	816.120.000,00	653.470.810,00	80,07%	162.649.190,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.068.998,00	16.493.400,00	82,18%	3.575.598,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.912.034.349,00	1.884.519.585,00	98,56%	27.514.764,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	991.764.704,00	157.011.167,00	15,83%	834.753.537,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.400.000,00	33.467.933,00	39,65%	50.932.067,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409.334.704,00	108.051.234,00	26,40%	301.283.470,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.000.000,00	6.060.000,00	7,05%	79.940.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	375.000.000,00	7.412.000,00	1,98%	367.588.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.030.000,00	2.020.000,00	5,46%	35.010.000,00
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.665.669.476,00	41.327.766.894,00	72,93%	15.337.902.582,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	628.973.786,00	413.078.500,00	65,67%	215.895.286,00
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	110.922.386,00	7.906.500,00	7,13%	103.015.886,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	518.051.400,00	405.172.000,00	78,21%	112.879.400,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35.325.000,00	3.030.000,00	8,58%	32.295.000,00
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.325.000,00	3.030.000,00	8,58%	32.295.000,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	56.001.370.690,00	40.911.658.394,00	73,05%	15.089.712.296,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	181.432.900,00	17.101.800,00	9,43%	164.331.100,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	55.819.937.790,00	40.894.556.594,00	73,26%	14.925.381.196,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.896.878.127,00	47.902.077.589,00	92,30%	3.994.800.538,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.786.000.000,00	7.324.015.984,00	83,36%	1.461.984.016,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.786.000.000,00	7.324.015.984,00	83,36%	1.461.984.016,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.053.376.849,00	10.161.937.257,00	84,31%	1.891.439.592,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	261.258.669,00	245.874.529,00	94,11%	15.384.140,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.890.464.390,00	6.961.122.242,00	88,22%	929.342.148,00
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.860.130.140,00	2.950.639.647,00	76,44%	909.490.493,00
		Evaluasi Kelurahan	41.523.650,00	4.300.839,00	10,36%	37.222.811,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31.057.501.278,00	30.416.124.348,00	97,93%	641.376.930,00
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	30.621.453.000,00	30.069.287.988,00	98,20%	552.165.012,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	335.561.378,00	285.412.550,00	85,06%	50.148.828,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	100.486.900,00	61.423.810,00	61,13%	39.063.090,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	142.961.020,00	97.733.500,00	68,36%	45.227.520,00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	142.961.020,00	97.733.500,00	68,36%	45.227.520,00
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	142.961.020,00	97.733.500,00	68,36%	45.227.520,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	169.250.000,00	111.000.000,00	65,58%	58.250.000,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	169.250.000,00	111.000.000,00	65,58%	58.250.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	169.250.000,00	111.000.000,00	65,58%	58.250.000,00
		Jumlah	160.482.353.579,00	134.815.948.712,00	84,01%	25.666.404.867,00



Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi

Kecamatan Tenggarong Tahun 2021



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis, diperoleh **rata-rata capaian kinerja sebesar 83%** dengan kategori **Baik**. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tenggarong menunjukkan hasil yang positif dengan rincian sebagai berikut:

1. **Sebagian besar sasaran (8 indikator) mencapai atau melampaui target ($\geq 100\%$), khususnya pada:**
 - a. Tindak lanjut keluhan masyarakat
 - b. Penyelesaian tindak lanjut LHP BPK
 - c. Implementasi SP4N Lapor
 - d. Pelaksanaan Satu Data Indonesia
 - e. Pelaksanaan GEMA
 - f. Partisipasi inovasi daerah
 - g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - h. Maturitas SPIP
 - i. Indeks Reformasi Birokrasi
2. **Satu sasaran belum tercapai optimal**, yaitu pelaksanaan dan pelaporan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan capaian 0%.
3. **Nilai SAKIP Kabupaten belum memenuhi target**, dengan capaian 86% dari target yang ditetapkan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Tenggarong telah menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tabel 24. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	60	60	100
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30	91,44	104
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3,83	128



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2025

	(SPIP)					
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA) "	Laporan	48	48	100
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,92	86
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						83



B. Permasalahan dan Tantangan

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Tahun 2025 antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
2. Perlunya penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Tantangan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.
4. Kebutuhan penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal.

C. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

Untuk meningkatkan kualitas kinerja pada Tahun Anggaran 2026, Kecamatan Tenggarong menetapkan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Menjadwalkan Forum Konsultasi Publik secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan evaluasi dokumen SAKIP.
3. Mengoptimalkan digitalisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat.
4. Mempertahankan dan meningkatkan level maturitas SPIP.
5. Memperkuat monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap capaian kinerja.

Dengan komitmen perbaikan berkelanjutan, diharapkan capaian kinerja Tahun 2026 dapat meningkat dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.



D. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa mendatang.

Tenggarong, Februari 2026

CAMAT TENGGARONG

Drs. Syukur Eko Budi Santoso

NIP. 19680907 199902 1 001